

## TORON TOMPA'AN TRADISI KEPEMIMPINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI KASUS NELAYAN MADURA DI PANARUKAN

### A LEADERSHIP TRADITION IN MADURESE FISHING COMMUNITY IN PANARUKAN

Diah Ismoyo Wati

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang

Pos-el: dee\_mnizzz@yahoo.co.id

#### Abstrak

Berbasis penelitian lapangan, artikel ini mendiskusikan prinsip kepemimpinan maritim di komunitas nelayan Madura di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Komunitas ini memiliki tradisi unik yang disebut *toron tompa'an*. Dalam tradisi ini, juragan laut akan merasa malu dan memutuskan mengundurkan diri ketika dia gagal memperoleh ikan yang banyak, khususnya tongkol. Meskipun untuk memperoleh posisi tersebut membutuhkan kerja keras dan mekanisme ketat, ia memutuskan mundur karena kegagalan mendapatkan tangkapan yang banyak berarti ia sebagai pemimpin tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak buah dan juragan darat (pemilik kapal). Bagi konteks Indonesia, tradisi mundur dalam *toron tompa'an* akan memberikan pelajaran yang bagus bagi elit politik dan pemerintah yang tidak pernah memiliki tradisi mundur ketika membuat kesalahan fatal dalam menjalankan pemerintahan. Lebih jauh, tradisi tersebut akan menjadi nilai yang cocok untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik dan demokratis.

**Kata kunci:** komunitas nelayan Madura, Panarukan, *toron tompa'an*

#### Abstract

Based on field research, this article discusses maritime leadership principle in Madurese fishing community, in Panarukan, Situbondo, East Java. This community has a unique tradition called as *toron tompa'an*. In this tradition, *juragan laut* (a ship leader) will feel very ashamed and decide to resign from his position if he failed in getting more fishes, especially cob fish. Although for reaching the position as *juragan laut* needs hard works and strict step by step mechanism with good achievement, he decide to resign because such failure means he, as a leader, cannot give enough livelihoods to the crews and *juragan darat* (a ship owner). For Indonesian context, the resign tradition in *toron tompa'an* will give a good teaching for political and governmental elites who never have such tradition when they made fatal failure in conducting the governance. Further, the tradition will be suitable value for making Indonesia better and more democratic.

**Keywords:** Madurese fishing community, Panarukan, *toron tompa'an*

#### A. Pendahuluan

Lebih seperempat abad lalu, seorang sejarawan Indonesia mengingatkan bahwa salah satu persoalan penting dalam

masyarakat Indonesia pada masa transisi adalah perubahan struktur sosial, termasuk perubahan kedudukan kelompok elite dalam menjalankan transformasi menuju

bangsa modern dan maju (Kartodirdjo, 1983:vii). Menurut Karl Mannheim (dalam Bottomore, 2006:141), untuk mencapai kemodernan dan kemajuan di tengah persaingan global, setiap bangsa memerlukan kaum elite yang mempunyai gaya kepemimpinan efisien dan berjiwa *enterprise*. Kepemimpinan ini menekankan nilai sportivitas, demokrasi, kompetisi, dan berorientasi pada prestasi.

Sebagian elite Indonesia rupanya belum sepenuhnya menganut nilai-nilai itu, seperti tampak dalam kasus korupsi di Bank Bapindo tahun 1993. Berbagai demonstrasi digelar oleh kalangan pemuda dan mahasiswa. Mereka menuntut para pejabat negara yang terlibat dalam kasus itu mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam menanggapi tuntutan itu, Try Sutrisno, wakil presiden pada waktu itu, menyatakan bahwa tuntutan para demonstran kepada para pejabat yang terlibat kasus korupsi Bapindo terlalu berlebihan. Menurutnya, tuntutan itu merupakan manifestasi budaya asing (Barat) dan bertentangan dengan budaya Indonesia (*Kompas*, 13 April 1994). Dalam perkembangan mutakhir, hal serupa itu dapat dilihat pada kasus *bail out* Bank Century yang dianggap bermasalah. Banyak kalangan menyampaikan tuntutan agar Budiono dan Sri Mulyani sebagai pejabat yang dipandang paling bertanggung jawab dalam kasus itu mengundurkan diri dari jabatan, yakni sebagai wakil presiden dan menteri keuangan. Budiono menyatakan tidak akan mengundurkan diri dengan alasan bahwa jabatan yang kini disandang merupakan amanah. Ia berpendapat bahwa pengunduran diri merupakan pelarian diri dari tanggung jawab dan pelecehan terhadap amanat rakyat yang telah memilihnya. Namun demikian ia menegaskan siap mengundurkan diri secara suka rela jika MPR memutuskan bahwa ia telah melanggar sumpah jabatan (*Suara Merdeka*, 4 Maret 2010). Dua contoh kasus di atas memunculkan kesan bahwa

dalam kebudayaan Indonesia tidak dikenal pengunduran diri dari jabatan.

Dalam peradaban modern, politik telah didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban publik. Prinsip-prinsip itu berorientasi pada perwujudan *good government* dan *clean government* yang menempatkan publik sebagai subjek politik dan mempunyai hak atas para politisi yang memegang kendali dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, para pejabat negara dan politisi harus menjalankan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Penyelenggara negara memegang kendali kekuasaan karena diinginkan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak, misalnya melalui mekanisme tertentu yang telah menjadi konsensus. Kekuasaan penyelenggaraan negara dalam konteks ini bertalian erat dengan masalah legitimasi sebagai pondasi bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memegang dan mempergunakan kekuasaan. Jika seorang penyelenggara negara menyelewengkan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya, secara etis dan moral ia kehilangan legitimasi atau setidaknya legitimasi itu terdegradasi.

Negara-negara maju, etika dan moral politik itu dipraktikkan, salah satunya, dalam bentuk abdikasi atau pengunduran diri dari jabatan. Hal ini terjadi, karena kekuasaan dan jabatan tidak dipandang sebagai tujuan, melainkan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Jika seseorang gagal dalam menggunakan sarana itu ia mengundurkan diri dari jabatan yang disandangnya untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk memegang jabatan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, yakni menciptakan kebaikan bersama (*common goods*). Jepang dapat dijadikan sebagai contoh dari etika dan moral politik terkait dengan bentuk praktik abdikasi. Perdana Menteri Noboru Takeshita pada April 1989 mengundurkan

diri karena korupsi yang tidak dilakukannya, melainkan dilakukan oleh anggota partainya, LDP (*Liberal Democratic Party*). Hosokawa mengundurkan diri karena terlibat skandal suap politik sampai ratusan juta yen atau setara dengan 2,1 triliun rupiah pada 1992-1993 (*Kompas*, 13 April 1994). Negara Barat juga mempunyai tradisi politik serupa, seperti pengunduran diri seorang Diplomat Inggris di Rusia, James Hudson, karena ketahuan berhubungan seks dengan dua orang pekerja seks komersial (<http://ksk.us/2162759>, diunduh pada 12 November 2009) Para pejabat di Jepang dan negara-negara Barat akan mengundurkan diri dari jabatan jika mereka dikritik oleh masyarakat dan pers baik yang disebabkan oleh pembuatan kebijakan yang salah dan merugikan kepentingan rakyatnya, melakukan korupsi maupun terlibat skandal seksual. Pengunduran diri itu dilakukan secara suka rela tanpa menunggu keputusan atasan. Bahkan ketika seseorang baru dicalonkan sebagai pejabat dan kemudian diketahui oleh publik pernah terlibat kasus atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika sosial, ia pun akan membatalkan pencalonannya itu.

Kajian ini menggunakan metode yang lazim digunakan dalam studi antropologi budaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan guna mendapatkan gambaran tentang tradisi *toron tompa'an* dan nilai-nilai kepemimpinan dalam tradisi itu. Informan yang diwawancarai meliputi: *juragan darat*, *juragan laut*, ABK, dan tokoh masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai itu dijalankan dalam kehidupan keseharian. Untuk kepentingan itu penulis tinggal selama tiga minggu di kalangan masyarakat nelayan Madura di Panarukan. Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran pustaka berupa literatur dan hasil penelitian yang dipublikasikan yang relevan dengan subjek kajian. Studi pustaka dilakukan untuk membangun kerangka teori dan untuk memperoleh

data serta informasi mengenai tradisi dan corak kebudayaan masyarakat maritim.

## **B. Kepemimpinan *Enterprise* dan Tradisi *Toron Tompa'an***

Pengunduran diri merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan atau kesalahan. Pejabat dan politisi yang merasa gagal mengembankan kepercayaan publik atau terindikasi terlibat dalam penyelewengan kekuasaan atau skandal akan melepaskan jabatannya sebagai manifestasi rasa malu kepada publik. Perasaan tidak memiliki muka lagi menjadi alasan bagi seseorang untuk mundur dari jabatan karena ia telah kehilangan kepercayaan publik yang merupakan basis paling elementer dalam praktik kekuasaan, khususnya di negara yang menganut prinsip demokrasi.

Kasus pengunduran diri tidak mudah ditemukan di kalangan pejabat dan politisi Indonesia, walaupun Indonesia juga mengaku sebagai negara demokrasi. Keadaan ini bertalian antara lain dengan pandangan tentang jabatan. Bagi masyarakat Jepang atau Barat, misalnya, jabatan dilihat sebagai ruang berkiprah untuk kepentingan rakyat sehingga memiliki nilai pertanggungjawaban publik yang tinggi. Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat (Ongkhokham, 1983:4). Sementara itu, di Indonesia jabatan cenderung dipandang sebagai tujuan dan cita-cita. Perubahan sosial juga telah menumbuhkan sikap mental yang tidak baik dalam masyarakat Indonesia, yaitu semakin menipisnya rasa malu dan kecenderungan memilih jalan pintas (*nrrabas*) untuk mencapai posisi tertentu (Sairin, 2002:218-219). Manakala jabatan atau posisi yang diharapkan telah diraih, para penyandanganya berusaha untuk mempertahankannya, sehingga jarang ada pejabat yang dengan rendah hati dan suka rela mengundurkan diri dari jabatan ketika mereka gagal dalam menjalankan

tugas ataupun melakukan tindakan tidak terpuji seperti korupsi. Dalih yang dikemukakan bermacam-macam, misalnya, pernyataan pengunduran diri dari jabatan merupakan pelarian diri dari tanggung jawab atau merupakan bagian dari budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Apakah benar dalam kebudayaan Indonesia tidak tersedia ruang untuk mengembangkan rasa malu, misalnya dengan mengundurkan diri dari jabatan bagi para pejabat atau pemimpin yang telah gagal menjalankan tugas? Jika pertanyaan itu ditarik lebih jauh, apakah benar dalam kebudayaan Indonesia tidak terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan basis pembentukan kepemimpinan *enterprise* yang dapat membawa Indonesia pada kondisi yang lebih baik?

Penulis berpendapat bahwa nilai-nilai kepemimpinan *enterprise* sebetulnya dikenal dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tradisi *toron tompa'an*, yang berarti turun atau mengundurkan diri dari jabatan, di kalangan masyarakat nelayan Madura di Panarukan, Jawa Timur, khususnya pada musim ikan tongkol (*auxis thazard*). Kapitan laut, dalam istilah setempat disebut *juragan laut*, sebagai pemimpin organisasi kerja di laut akan merasa sangat malu jika ia gagal mendapatkan tangkapan ikan, khususnya tongkol, dalam jumlah banyak. Selain dianggap sebagai kegagalan dalam melaksanakan kepercayaan dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemilik kapal (*juragan darat*), hal itu juga dianggap sebagai kegagalan *juragan laut* dalam memimpin dan memberi nafkah bagi keluarga dan Anak Buah Kapal (ABK). *Juragan laut* melakukan *toron tompa'an* sebagai cara mempertanggungjawabkan kegagalan itu. Tampak bahwa dalam tradisi *toron tompa'an* sebagai bagian dari kebudayaan maritim terdapat kearifan lokal yang dapat dijadikan inspirasi bagi upaya pembentukan jiwa kepemimpinan *enterprise* untuk membangun Indonesia

yang demokratis dan meningkatkan daya saing pada era globalisasi.

Dalam tulisan ini dibahas lebih jauh tentang nilai-nilai kepemimpinan *enterprise* dalam kebudayaan maritim, khususnya dalam masyarakat nelayan Madura di Panarukan. Pemilihan topik ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Posisi di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia juga menjadikan Indonesia sebagai kawasan yang dinamis dalam percaturan politik dan ekonomi dunia, sehingga logis jika pembangunan nasional termasuk dalam aspek sosial politik dan sosial budaya didasarkan pada bidang kemaritiman (Kusumastanto, 2003:1). Pada masa lalu kebudayaan maritim juga berjaya di nusantara, seperti ditunjukkan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang mampu membangun kebesarannya dengan berlandaskan pada visi kemaritiman dan kesadaran yang tinggi terhadap keunggulan strategis letak geografis wilayah bahari nusantara. Kedua kerajaan maritim itu menjadi *centre of excellence* di bidang kemaritiman, kebudayaan, dan agama di Asia Tenggara (Pramono, 2005:7). Pembahasan topik ini berdasarkan pada persoalan bagaimana sistem kepemimpinan laut dalam masyarakat nelayan Madura di Panarukan dan nilai-nilai apa dalam sistem kepemimpinan laut dalam masyarakat nelayan Madura di Panarukan yang dapat dikembangkan untuk membangun jiwa kepemimpinan *enterprise*?

Selama ini ada kecenderungan bahwa pembicaraan tentang kepemimpinan di Indonesia dihubungkan dengan "orang-orang besar" dan kebudayaan keraton serta kebudayaan agraris. Kajian tentang kepemimpinan yang berorientasi pada "orang-orang besar" menciptakan sejarah elitis atau sejarah tanpa rakyat (Purwanto, 2008:27). Sementara itu penekanan pada kebudayaan keraton dan agraris dalam kajian kepemimpinan menciptakan

pandangan yang kurang apresiatif terhadap kebudayaan maritim. Hal ini tercermin antara lain dari pandangan para penganut kebudayaan keraton terhadap masyarakat nelayan khususnya di pantai utara Jawa sebagai masyarakat yang tidak memahami sopan-santun, *cedhak watu adohratu* (Semedi, 2003:49), dan kasar dalam bertutur kata dan bertindak (Thohir, 1998:96-106; 1999:264-271). Tulisan ini menunjukkan bahwa masyarakat maritim, khususnya nelayan di pantai utara Jawa, yang dianggap perifer dalam kebudayaan Indonesia dan sering kali diidentikkan dengan kemiskinan (Mubyarto, 1984:171-172; Kusnadi, 2007:5-16) serta keterbelakangan (Kusumastanto, 2003:63) ternyata memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang dapat disumbangkan untuk membangun jiwa kepemimpinan *enterprise*.

Tradisi *toron tompa'an* merupakan bagian dari kebudayaan maritim yang terdapat seperangkat model pengetahuan dan nilai yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasi lingkungan dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlukan bagi masyarakat pendukungnya (Thohir, 1999:267-268), dalam hal ini adalah masyarakat nelayan Madura di Panarukan.

Nababan (2003) menyatakan bahwa dalam setiap kebudayaan lokal terkandung kearifan yang ditumbuhkembangkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Keraf (dalam Nobunome, 2006:87-88), kearifan lokal merupakan bagian dari etika moral yang dijadikan panduan bagi manusia dalam bertindak. Kearifan lokal mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, kebiasaan, dan adat yang menuntun manusia dalam membangun hubungan dengan sesamanya dan lingkungan alam. Salah satu bentuk kearifan lokal dalam kebudayaan masyarakat maritim adalah jenjang kepemimpinan yang dimulai dari bawah (Alimuddin, 2004:54), penghargaan yang tinggi terhadap harga diri dan prestasi kerja (Kusnadi, 2007:22), dan pengunduran

diri dari jabatan ketika terjadi kegagalan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut (*Surabaya Post*, 4 November 1999). Menurut Mattulada, nilai-nilai itu menjadi basis kepemimpinan maritim yang berpuncak pada kapitan laut atau nahkoda kapal. Kepemimpinan maritim mementingkan kemampuan dan prestasi kerja untuk sampai ke puncak strata (*Kompas*, 30 Januari 1993).

Salah satu unsur dalam kepemimpinan maritim adalah bersifat otonom. *Juragan darat* sebagai pemilik modal dan alat-alat produksi, *juragan laut*, dan *pandhiga* (ABK, awak perahu) mempunyai kewenangan masing-masing. Pemilik modal tidak dibenarkan mengatur *juragan laut* dalam urusan perahu dan jalur pelayaran, demikian pula sebaliknya. *Pandhiga* juga tidak dianggap sebagai budak. Para awak perahu dapat berpindah kerja dari perahu satu ke perahu lain menuruti semangat hidup manusia merdeka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik (Semedi, 2002:55).

Bagi nelayan Madura, ancaman keganasan alam, badai, dan gelombang laut tidak menjadi halangan nelayan dalam melakukan aktivitasnya. Suatu yang dikhawatirkan dan ditakuti adalah apabila dalam melaut mereka tidak memperoleh hasil yang akan berdampak pada kehidupan keluarga nelayan yang menjadi terpuruk (Sumintarsih, 2005:80). Kegagalan dalam penangkapan ikan juga akan menimbulkan rasa malu pada diri *juragan laut* dan menjadi alasan paling kuat untuk mengundurkan diri dari jabatan itu. Ketika terjadi kegagalan dalam penangkapan ikan, seorang pemimpin perahu akan merasa malu karena merasa tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh *juragan darat* dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan para ABK-nya. Pengunduran diri ini disertai dengan penyelesaian hutang-piutang jika sang *juragan laut* masih mempunyai tanggungan dengan *juragan darat* (Kusnadi, 2007:37).

Pengunduran diri seorang *juragan laut* pada masyarakat nelayan Madura di Panarukan dilakukan terutama pada musim tongkol. Tongkol merupakan jenis ikan yang berasosiasi dengan rumpun sehingga memudahkan proses penangkapannya (Sudirman, 2000:27-29) Itu pula sebabnya kegagalan untuk mendapatkan tongkol yang melimpah dapat menimbulkan rasa malu pada diri *juragan laut*.

Nilai-nilai kepemimpinan maritim yang berorientasi pada kemampuan dan prestasi kerja dapat dijadikan model bagi kepemimpinan masyarakat demokratis dan berorientasi pada kemajuan, apalagi jika dikaitkan dengan wacana tentang masyarakat kewargaan (*civil society*) yang berkembang di Indonesia pada saat ini. Alam (1999:3-10) dalam hal ini berpendapat bahwa *civil society* menunjuk pada wilayah antara negara dan komunitas lokal. Kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, dan kemandirian merupakan isu-isu penting dalam *civil society*. Tradisi *toron tompa'an* sebagai bagian dari kebudayaan maritim yang mengandung kearifan lokal untuk dijadikan inspirasi bagi upaya pembentukan jiwa kepemimpinan bangsa Indonesia dapat diperoleh dari tradisi nelayan Madura di Panarukan.

### C. Kepemimpinan Laut dalam Masyarakat Nelayan Madura di Panarukan

Aktivitas penangkapan ikan di laut dalam masyarakat nelayan Madura di Panarukan dilakukan dengan menggunakan perahu *slerek*. Perahu ini berukuran 8-10 meter dan lebar 4-5 meter yang dilengkapi dengan 3 mesin, dan berkekuatan 17 PK atau 23 PK. Mesin merupakan sarana yang paling utama untuk menjalankan perahu. Dalam hal ini, dua mesin digunakan untuk menjalankan perahu dan satu mesin berfungsi untuk menarik payang yang telah dilepas ke laut. Payang perahu *slerek* disebut juga payang kantong karena bentuknya

yang menyerupai kantong pada saat dioperasikan. Perahu *slerek* di Panarukan merupakan tulang punggung utama dari produksi perikanan setempat. Perahu ini mulai dimiliki pada tahun 1993 (Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo, 1994). Kehadiran perahu *slerek* telah menggantikan perahu *gelete* yang dipergunakan untuk menangkap jenis ikan yang sama.

Organisasi kerja pada perahu *slerek* terdiri atas 27 orang yang dalam garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah *angkuren* (tenaga ahli) yang berjumlah 10 orang. Mereka terdiri atas: seorang *juragan laut*, seorang wakil *juragan laut*, seorang *tokang nyubeng* yang bertugas melempar jaring ke tengah laut, dua orang *tokang ngereng* yang bertugas memperbaiki timah *slerek*, dua orang *tokang lampu*, dua orang *tokang mesin*, dan seorang *pangoras* yang bertugas menjaga dan membersihkan perahu. Kelompok kedua adalah *pandhiga* (ABK) yang berjumlah 17 orang dan bertugas menarik jaring. Dalam organisasi ini posisi tertinggi ditempati oleh *juragan laut* yang bertugas melakukan pembagian kerja dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan kegiatan penangkapan ikan. Untuk memudahkan identifikasi dan pemahaman pembagian kerja dan tingkat perolehan hasil nelayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Spesialisasi kerja di perahu dan hasil yang diterima

No	Spesialisasi Kerja	Jumlah andhiga (orang)	Jumlah Sara an
1	Juragan laut	1	5
2	Makel Mudi	1	3
3	Tokang Mesin	2	3
4	Tokang Lampu	2	2

5	Tokang Nyobeng	2	2
6	Tokang Ngereng	2	2
7	Pangoras	2	3
8	ABK penarik jaring	15	1,5
<b>Jumlah</b>		27	54,5

Proses untuk menjadi *juragan laut* tidaklah mudah. Seseorang harus mengawalinya dari posisi terbawah, yaitu sebagai ABK penarik jaring. Jika dinilai rajin, disiplin, dan cakap dalam pekerjaan, mereka akan ditingkatkan statusnya sebagai *angkuren* atau tenaga ahli. Selanjutnya jika pengetahuannya tentang kelautan dan perikanan dinilai telah memadai, ia dapat diangkat sebagai wakil *juragan laut*. Prestasi kerjanya akan selalu dipantau oleh *juragan darat*, yang diukur berdasarkan hasil tangkapan. Jika pengetahuan tentang kelautan dan perikanan, kecakapan dalam memimpin ABK, dan prestasi kerjanya terus meningkat, *juragan darat* akan melamar wakil *juragan laut* itu sebagai *juragan laut* yang sepenuhnya dipercaya untuk mengoperasikan perahu dan memimpin ABK dalam kegiatan penangkapan ikan.

*Juragan darat* hanya memilih orang yang berprestasi unggul sebagai *juragan laut*. Oleh karena itu, tenaga ahli yang dianggap biasa-biasa saja tidak akan dilamar dan dipilih sebagai *juragan laut* meskipun ia merupakan kerabat dekat sang *juragan darat*. Selain itu, mereka harus memiliki sifat-sifat, seperti: beriman dan berta wa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki tujuan dan haluan hidup yang jelas, melihat ke depan dan menarik pelajaran dari masa lalu, waspada, berani dan bertanggung jawab, bersikap dan berpikir luwes, berpikir menyeluruh. Dia harus mengutamakan keselamatan kapal

dan anak buahnya, mengayomi anak buah dan keluarganya, serta membina persaudaraan sesama pelaut. Sifat-sifat tersebut merupakan hasil dari musyawarah para pelaut Makassar tahun 1676 yang tertuang dalam lontar *Amanna Gappa* dan menjadi pedoman hukum pelayaran dan perdagangan laut dari Selat Malaka sampai Laut Banda (Wahyono, 2009:24-26). Sifat-sifat demikian telah dijalankan oleh nelayan Madura di Panarukan. Akan tetapi, mereka tidak menyadari kalau sifat tersebut merupakan hasil musyawarah pelaut terdahulu dan sudah menjadi ketentuan dalam hukum pelayaran dan perdagangan.

Terkait dengan persoalan kepemimpinan, *juragan laut* dalam memimpin ABK bersifat otonom dan "semi militer" karena pekerjaan yang dijalani penuh dengan risiko dan berhadapan dengan kondisi alam yang tidak menentu. Jadi, sangat dimungkinkan akan terjadinya kegagalan dalam melaut. Apabila *juragan laut* mengalami kegagalan melaut, dalam artian tidak mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah, terutama ikan tongkol atau dirasa tidak mencukupi kebutuhan *juragan darat* dan para ABK yang dipimpinnya, *juragan laut* itu akan didera rasa malu (*todhus*) yang mendalam. Kegagalan mendapatkan ikan tongkol sepenuhnya menjadi tanggung jawab *juragan laut* selaku pemimpin tertinggi dalam organisasi kerja. Ia akan memutuskan untuk mengundurkan diri (*toron tompa'an*) sebelum mendapat sindiran atau didemo oleh ABK atau *juragan darat* atau bahkan masyarakat nelayan umumnya. *Toron tompa'an* selalu dilakukan oleh *juragan laut* yang merasa dan atau dinilai telah gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Hal ini berlangsung sejak dahulu dan terjadi dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Oleh karena itu, *toron tompa'an* dikatakan sebagai tradisi masyarakat nelayan Madura di Panarukan yang sampai saat ini masih tetap eksis dijalankan.

Tradisi yang bernafaskan demokrasi ini mampu eksis karena sesuai dengan karakteristik masyarakat pendukungnya, yaitu penghuni wilayah tapal kuda dengan budaya *mendalungan* yang khas. Budaya demokrasi yang dijalankan bercirikan: partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang cukup tinggi; kritis dalam menilai pemimpin; tanggap dan cepat dalam menyikapi persoalan; kontrol terhadap penyimpangan cukup lugas dan tegas; serta ketidakpuasan dalam kepemimpinan diekspresikan secara terbuka dan demonstratif (Zuhro, 2009:36-96).

*Toron tompa'an* tidak dipahami sebagai pelarian diri *juragan laut* dari tanggung jawabnya berdasarkan alasan berikut. Pertama, pengunduran diri itu harus disertai dengan penyelesaian urusan antara *juragan laut* dan *juragan darat*, misalnya mengenai utang-piutang. Kedua, pengunduran diri dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih mampu untuk menjadi *juragan laut*. Ketiga, pengunduran diri itu juga merupakan cara untuk "menyelamatkan muka" atau menjaga harga diri *juragan laut*. Hal ini dianggap jauh lebih penting daripada tetap bertahan di posisinya tetapi merugikan *juragan darat* dan ABK serta menjadi bahan pergunjungan. Prinsip hidup orang Madura pada umumnya adalah menjunjung tinggi harga diri. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan *pote' mata ban pote tolang, lebbi bhagus apote' tolang atau lebbi bhaghus pote' tolang, etembhang pote mata* (lebih baik berputih tulang dari pada berputih mata atau lebih baik mati dari pada malu karena tidak bisa membela harga diri) (Kusumah, 2003:18). *Juragan laut* yang melakukan *toron tompa'an* akan kembali ke posisi sebelumnya, yaitu sebagai tenaga ahli.

### 1. Ikan Tongkol dalam Masyarakat Nelayan Madura di Panarukan

Perahu *slerek* yang dioperasikan oleh nelayan Madura di Panarukan menggunakan alat bantu berupa rumpon.

Rumpon atau pengumpul ikan adalah benda padat yang dibuat terapung dalam air, ditambatkan oleh nelayan dengan pemberat di dasar untuk menarik banyak kumpulan ikan sehingga mereka mudah menangkapnya dengan menggunakan pancing atau jala. Selain itu, rumpon merupakan tempat berkumpulnya plankton dan ikan-ikan kecil lainnya, sehingga mengundang ikan-ikan yang lebih besar untuk tujuan *feeding* (Sudirman, 2000:27).

Ikan Tongkol merupakan salah satu spesies yang berasosiasi dengan rumpon dan merupakan target utama penangkapan bagi nelayan Madura di Panarukan. Hal ini dikarenakan kelimpahannya yang relatif banyak dan harga pasarnya relatif tinggi. Lagi pula jenis ikan ini tidak mengenal musim, artinya di setiap musim selalu ada dan lebih mudah dicari.

Ikan Tongkol yang merupakan primadona penangkapan di Selat Madura telah menjadikan para nelayan di kawasan tersebut selalu berlomba untuk mendapatkannya. Kemudian, prinsip ekonomis yang berorientasi pada keuntungan membuat para nelayan menginginkan hasil tangkapan berupa tongkol agar penghasilannya maksimal. Oleh karena itu, ketika terjadi kegagalan dalam penangkapan tongkol akan membuat *juragan laut* malu karena area kerjanya syarat dengan ikan Tongkol.

### 2. Nilai-nilai Kepemimpinan dalam Tradisi Toron Tompa'an

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang penting menyangkut proses dan syarat menjadi pemimpin, hubungan pemimpin dengan pihak yang lebih tinggi (atasan) dan bawahan, dan konsekuensi atas kegagalan pemimpin. Berkaitan dengan proses menjadi pemimpin (*juragan laut*), seseorang harus mengawalinya dari tahap paling bawah (ABK) dan jika dinilai berprestasi akan terus berlanjut menjadi tenaga ahli, wakil *juragan laut*,

dan akhirnya menjadi *juragan laut*. Tahap-tahap itu menunjukkan bahwa pemimpin dalam masyarakat maritim tidak muncul secara *instant*. Seperti disebut Mattulada (*Kompas*, 30 Januari 1993), seseorang harus menjalani proses berjenjang untuk sampai pada puncak piramida sosial. Hal ini menunjukkan penghargaan tinggi terhadap proses dan kompetisi.

Proses berjenjang itu berfungsi sebagai semacam mekanisme untuk mencegah tumbuhnya mental *nrabas* (Sairin, 2002:218), sebab di dalamnya terjadi seleksi. Meskipun orang yang menjadi *juragan laut* harus dilamar oleh *juragan darat*, akan tetapi lamaran itu hanya ditujukan kepada orang yang memenuhi syarat dan tidak didasarkan pada pertimbangan ikatan kekerabatan. Syarat itu mencakup: penguasaan pengetahuan tentang kelautan dan perikanan berdasarkan pengalaman kerja yang lama, kejujuran dalam berbicara dan bertindak, cakap memimpin ABK, bekerja keras, dan disiplin. Syarat lainnya adalah memiliki keberanian khususnya selama bekerja di laut dan yang paling penting adalah berorientasi pada target dan menghargai prestasi kerja.

Hubungan antara *juragan darat* dan *juragan laut* serta ABK bersifat terbuka dan demokratis. Penilaian terhadap prestasi kerja didasarkan pada kemampuan yang dapat dilihat oleh setiap orang yang terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan. Sekalipun ada klasifikasi yang menunjukkan perbedaan posisi, akan tetapi relasi dalam organisasi kerja di laut bersifat kolegial. Perbedaan posisi di antara mereka lebih didasarkan pada spesifikasi pekerjaan, dan hal ini diperlukan agar kegiatan penangkapan ikan dapat berjalan lancar dan berhasil. Relasi antara *juragan darat* dan *juragan laut* serta ABK juga bersifat kekeluargaan. Dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat musim sepi ikan (*paceklik*), *juragan darat* akan memenuhi kebutuhan *juragan laut* dan ABK, sebagai balasannya mereka

akan memberi layanan kepada keluarga *juragan darat*, misalnya memberi bantuan tenaga pada saat *juragan darat* mempunyai kerja besar. Meskipun demikian hubungan itu tidak mengikat *juragan laut* dan ABK untuk bekerja pada *juragan darat*. Seperti terjadi dalam masyarakat nelayan di berbagai tempat (Semedi, 2002), nelayan di Panarukan memiliki kebebasan untuk berpindah kerja ke pemilik kapal lain. Kemudian, untuk mencapai keberhasilan, *juragan laut* dalam memimpin bersifat otonom dan semi militer.

Sementara itu berkaitan dengan konsekuensi atas kegagalan, *juragan laut* yang tidak dapat memenuhi target atau memperoleh hasil tangkapan yang banyak akan mengundurkan diri. Dilihat dari alasan pengunduran diri yang telah disebut di atas dapat dilihat adanya nilai sportifitas dan penghargaan terhadap harga diri atau martabat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan maritim bersifat terbuka. Dalam masyarakat yang menganut model kepemimpinan itu, setiap anggotanya memiliki peluang untuk meningkatkan kedudukan sosialnya dan mengambil alih kedudukan anggota lain melalui proses persaingan (Popper, 2002). Siapa pun yang berhasil dalam persaingan sesuai dengan kriteria yang berlaku berhak menjadi pemimpin. Keterbukaan itu pula yang menyebabkan seorang *juragan laut* mengundurkan diri dari jabatannya ketika ia merasa gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Pengunduran diri ini mempunyai nilai kepemimpinan yang sangat berharga, seperti: nilai rendah hati, yang dengan ksatria mengakui kegagalan; nilai tanggung jawab; nilai menjaga kerukunan sosial; nilai kewajiban menjaga tradisi; nilai demokratis dan berjiwa besar karena telah meletakkan jabatannya. Uraian di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam masyarakat maritim berorientasi kerakyatan.

### 3. Signifikansi Kepemimpinan Maritim dalam Indonesia Kontemporer

Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah terlibat intensif dalam perdagangan internasional melalui jalur laut dengan para pedagang Cina, Arab, Turki, dan Gujarat (Alatas, 1977:184). Kejayaan kerajaan maritim seperti Banten, Buton, Ternate, dan Tidore menunjukkan peran penting dunia kemaritiman Indonesia di masa lalu (Kartodirdjo, 1983). Kota-kota di pesisir utara Jawa seperti Jaratan, Gresik, Sedayu, Tuban, Surabaya, dan Jepara serta di pesisir Sumatera, Borneo (Kalimantan), Bali, Bima, Solor, Alor, Timor, Salayar, Buton, Maluku, Ambon, Banda, Kei, Aru, dan Seram merupakan kota pelabuhan dagang penting dalam perdagangan internasional (Schrieke, 1955:20). Tidak berlebihan jika Lopian (1992) kemudian menyatakan bahwa sejarah Nusantara pada hakikatnya merupakan sejarah maritim.

Dinamika masyarakat dan kebudayaan maritim Indonesia sejak pertengahan abad XVII menurun ketika Belanda menguasai dan menjadikan kota-kota pelabuhan dagang di pantai utara Jawa sebagai pusat pengendalian kegiatan perdagangan, tempat tinggal, dan pusat kekuasaan ekonomi, politik, dan militer (Nagtegaal, 1996:94-96). Mataram yang semula berkuasa atas kawasan pesisir itu kehilangan akses terhadap pelabuhan dan laut, sehingga kerajaan itu akhirnya lebih dikenal sebagai kerajaan agraris. Dominasi Belanda atas kawasan pesisir juga memaksa pedagang pribumi mengalihkan aktivitasnya ke kota pedalaman. Dampak kondisi itu masih terasa hingga sekarang. Di kalangan peneliti baik dari Indonesia maupun asing, kebudayaan Jawa lebih dipahami sebagai kebudayaan keraton dan agraris (Kistanto, 2000:136). Menurut Pemberton (1994) kebudayaan Jawa keraton dan agraris bahkan telah direproduksi dalam periode Indonesia kontemporer terutama sepanjang masa Orde Baru.

Hal itu tidak berarti kebudayaan maritim telah sama sekali hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya sistem pengetahuan dan nilai yang berorientasi ke laut di kalangan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa kebudayaan maritim masih bertahan dalam sebagian masyarakat Indonesia. Dalam bentuk yang mudah dikenali ekspresi pengetahuan dan nilai kemaritiman tampak dari pilihan mata pencaharian sebagai nelayan atau pada pilihan tempat hidup sebuah komunitas di kawasan pesisir atau di atas perahu di sekitar pantai (Semedi, 2002). Namun harus diakui pula bahwa ekspresi kebudayaan maritim belum sepenuhnya tercermin dalam konteks kehidupan yang lebih luas pada tataran negara. Walaupun telah mendapat pengakuan internasional sebagai negara kepulauan (*archipelegic state*) dan *International Conference on Sea Law* di Caracas pada tahun 1982 telah meratifikasi konsep Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), namun kebijakan nasional secara umum memperlihatkan sudut pandang pemerintah yang berorientasi kontinental (Suroyo *et al.*, 2007:10-13). Menurut Farida-Swasono (1997), negara maritim semestinya memiliki *state of mind* yang terwujud dalam kebijakan pemerintah dan aktivitas kehidupan masyarakatnya yang berorientasi ke laut.

Salah satu usaha untuk membangkitkan kembali kebudayaan maritim adalah dengan mengadopsi nilai-nilai dalam kebudayaan itu untuk membangun tradisi kepemimpinan di Indonesia pada masa kini dan masa mendatang. Model kepemimpinan maritim memiliki makna strategis bagi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Nilai-nilai kepemimpinan maritim yang berorientasi pada prestasi dapat dijadikan basis pembentukan masyarakat Indonesia yang modern dan maju (Kusnadi, 2007:22).

Secara umum karakteristik kepemimpinan maritim dipengaruhi egalitarianisme yang secara historis terbentuk

sejak awal Islamisasi di kota-kota pe-  
labuhan di kawasan pesisir (Wertheim,  
1999). Selain itu juga dipengaruhi nilai-  
nilai sosial budaya yang terbentuk lewat  
proses interaksi antara manusia dengan  
lingkungan dan pekerjaannya. Pekerjaan  
sebagai nelayan mengharuskan mereka  
melakukan kegiatan penangkapan di laut  
dan hal ini melahirkan sifat kompetitif dan  
bekerja keras. Keberhasilan dalam kegiatan  
penangkapan dapat dicapai kalau mereka  
menguasai pengetahuan kelautan dan  
perikanan yang baik dan pengalaman kerja  
*mumpuni*. Keberhasilan itu berdampak  
positif pada peningkatan pendapatan  
yang dapat mengantarkan mereka sebagai  
orang yang berhasil secara ekonomis. Pada  
gilirannya hal ini selain dapat membentuk  
kemandirian masyarakat lokal sebagai  
salah satu kekuatan penopang masyarakat  
kewargaan (Alam, 1999), juga akan  
melahirkan sikap mementingkan prestasi  
dan keahlian dalam bekerja.

#### D. Simpulan

Struktur masyarakat nelayan Madura  
di Panarukan terdiri atas (1) juragan darat,  
(2) juragan laut, dan (3) ABK. Struktur  
organisasi kerja di laut terdiri atas 10  
orang *angkuren* (tenaga ahli) dan 17 orang  
ABK yang bertugas menarik jaring. Posisi  
tertinggi ditempati oleh *juragan laut* yang  
bertanggung jawab secara penuh atas  
keberhasilan kegiatan penangkapan  
ikan. Relasi kerja di laut bersifat kolegal,  
kekeluargaan, dan saling membantu.  
Perbedaan posisi berdasarkan spesifikasi  
tugas agar pekerjaan lancar dan berhasil.

Tradisi *toron tompa'an* berarti turun  
atau pengunduran diri dari jabatan.  
*Juragan laut* sebagai pemimpin organisasi  
kerja di laut merasa malu jika gagal  
mendapatkan ikan yang banyak. Hal itu  
juga dianggap sebagai kegagalan dalam  
melaksanakan kepercayaan dan tanggung  
jawab yang diberikan pemilik kapal dan  
dalam memimpin serta memberi nafkah  
bagi keluarga ABK. *Juragan laut* akan  
mengundurkan diri dari jabatan sebagai

cara untuk mempertanggungjawabkan  
kegagalan itu. Hal itu menunjukkan  
nilai dan penghargaan tinggi terhadap  
proses dan kompetensi. *Juragan laut* harus  
memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1)  
penguasaan pengetahuan tentang kelautan  
dan perikanan berdasarkan pengalaman  
kerja yang lama, (2) jujur dalam berbicara  
dan bertindak, (3) cakap memimpin ABK,  
(4) bekerja keras, (5) disiplin, (6) berani,  
dan (7) berorientasi pada target dan  
menghargai prestasi kerja sehingga dapat  
mencegah mental *nrabas*.

Posisi sebagai *juragan laut* dapat  
ditempati oleh siapapun tanpa memandang  
hubungan kekerabatan. Model kepe-  
mimpinan seperti ini bersifat *enterprise* yang  
menghargai prestasi. Nilai-nilai positif  
dalam kebudayaan masyarakat mari-  
tim, khususnya mengenai kepemimpinan  
tersebut, berpotensi sebagai salah satu  
alternatif pengembangan kepemimpinan di  
Indonesia. Nilai-nilai kebudayaan maritim  
juga berpotensi sebagai basis pembentukan  
etos masyarakat dalam menghargai proses,  
kerja keras, keterbukaan, demokrasi,  
dan orientasi pada prestasi. Etos tersebut  
diperlukan dalam membangun Indonesia  
sebagai negara modern yang demokratis  
agar mampu berkiprah pada tataran global  
dan sekaligus untuk membangkitkan  
kembali kejayaan peradaban maritim.

#### Daftar Pustaka

- Alam, Bachtiar. 1999. "Antropologi dan  
*Civil Society*: Pendekatan Teori  
Kebudayaan," dalam *Antropologi  
Indonesia*. Indonesia Journal of  
Social and Cultural Anthropology,  
(60), hlm. 3-10.
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. 2004.  
*Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut?*  
Yogyakarta: Ombak.
- Bottomore. 2006. *Elite dan Masyarakat*.  
Terjemahan Abdul Harris dan Sayid  
Umar. Jakarta: Akbar Tandjung  
Institute.

- Farida-Swasono, Meutia. 1997. "Masyarakat Bahari di Indonesia: Masa Lalu, Masa Kini, dan Tantangan Masa Depan," Makalah pada seminar Membangun Kembali Peradaban Bahari, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Kampus Universitas Indonesia Depok, 24 April 1997. Depok: Universitas Indonesia.  
<http://ksk.us/2162759>, diunduh pada 12 November 2009.
- Kartodirdjo, Sartono. 1983. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Kistanto, Nurdien H. 2000. "Etnografi tentang Masyarakat Jawa: Studi Pendahuluan mengenai Kebudayaan Masyarakat Jawa Kontemporer," dalam *Kajian Sastra* (1). Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.  
*Kompas*, 13 April 1994.  
*Kompas*, 30 Januari 1993.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.
- Kusumastanto, Tridoyo. 2003. *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lapian, A.B.. 1992. "Sejarah Nusantara Sejarah Bahari," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi,. Jakarta: UI-Press.
- Mubyarto. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Nababan. P.W.B. 2003. "Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan, dan Peluang," <http://dte.gn.org.../makalah.ttg.psd.berb-ma.di.pplh.ipb.Htm>.
- Nabunome, Welhelmus. 2006. "Peranan Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur," dalam *Sabda*, Jurnal Kajian Kebudayaan Vol. 1, No. 2, Desember 2006. Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.
- Onghokham. 1983. "Tradisi dan Korupsi," dalam *Prisma*, No. 2, Tahun XII, Februari 1983.
- Pemberton, John. 1994. *On the Subject of "Java"*. Ithaca: Cornell University Press.
- Popper, Karl R. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pramono, Djoko. 2005. *Budaya Bahari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanto, Bambang. 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schrieke, B. 1955. *Indonesia Sociological Studies*. The Hague Bandung: van Hoeve.
- Semedi, Pujo. 2002. "Political Life of Javanese Fishermen," dalam *Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Semedi, Pujo. 2003. *Close to The Stone, Far From the Throne: the Story of a Javanese Fishing Community 1820-1990*. Yogyakarta: Benang Merah.  
*Suara Merdeka*, 4 Maret 2010.
- Sudirman. 2000. *Teknik Penangkapan Ikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumintarsih. 2005. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.  
*Surabaya Post*, 4 November 1999.
- Suroyo, A.M. Dujiati. 2007. *Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad ke-17*.

- Semarang: Kerja sama Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara Lembaga Penelitian Undip dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan Penerbit Jeda.
- Surya Kusumah, Maulana. 2003. "Sopan, Hormat, dan Islam: Ciri-ciri Orang Madura," dalam *Kepercayaan, Magi dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda.
- Thohir, Mudjahirin. 1998. "Kebudayaan Masyarakat Pesisir," dalam *Kajian Sastra*. Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.
- Thohir, Mudjahirin. 1999. "Masyarakat Jawa Pesisiran," dalam *Kajian Sastra*. Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.
- Wahyono, S. K. 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju.
- Zuhro, Siti. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.